INOVASI
Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia
Kemitraan Australia Indonesia

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Australian Government

RISALAH KEBIJAKAN

MEMANFAATKAN PENILAIAN UNTUK MENINGKATKAN HASIL PEMBELAJARAN DAN MASUKAN BAGI PENGAMBILAN KEBIJAKAN

INOVASI adalah program kemitraan pendidikan antara Pemerintah Indonesia dan Australia yang bertujuan menemukan dan memahami cara-cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa - khususnya yang berkaitan dengan kemampuan literasi dan numerasi, baik itu di kelas maupun di sekolah.

www.inovasi.or.id
Inovasi Untuk Anak Sekolah Indonesia
INOVASI Pendidikan

NOVEMBER 2019

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kompleks Kemendikbud, Gedung E Lt. 19, Jl. Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta Pusat, 10270
021-5736365, 5713827 puslitjakbud@kemdikbud.go.id puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id

PENILAIAN MENJADI KUNCI UNTUK MENINGKATKAN HASIL PEMBELAJARAN SISWA DI INDONESIA

Sistem penilaian yang efektif memberikan informasi yang valid dan andal tentang hasil pembelajaran kepada siswa, guru, orang tua, dan pemerintah. Penilaian memberikan informasi mengenai perencanaan guru, sehingga mereka dapat menyesuaikan pelajaran dengan kebutuhan siswa. Penilaian juga meningkatkan akuntabilitas, karena memberikan dasar bagi guru untuk memberikan laporan kepada orang tua dan masyarakat luas tentang hasil pembelajaran anak, dan memberikan informasi kepada sekolah dan pemerintah agar mereka dapat merencanakan dan menyusun kebijakan berdasarkan bukti.

McKinsey & Company telah mengidentifikasi penilaian sebagai satu dari enam intervensi yang secara konsisten diterapkan untuk memperbaiki sistem sekolah, selain juga untuk mengembangkan keterampilan mengajar guru dan kemampuan manajemen kepala sekolah, perbaikan sistem data, peningkatan pendidikan melalui kebijakan dan undang-undang di bidang pendidikan, revisi standar dan kurikulum, serta penghargaan dan remunerasi yang tepat bagi guru dan kepala sekolah[1].

Ada dua jenis penilaian utama, yakni:

- penilaian *untuk kegiatan belajar mengajar* (penilaian formatif), biasanya dilakukan oleh guru di kelas agar mereka dapat merencanakan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa; dan
- penilaian *kegiatan belajar mengajar* (penilaian sumatif), dilakukan oleh guru, sekolah, dan sistem pendidikan untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai hasil-hasil pembelajaran yang diharapkan.

Kedua jenis penilaian ini penting, dan keduanya merupakan bagian dari strategi nasional Indonesia yang semakin berevolusi. Hasilnya dapat digunakan agar anak-anak tidak tertinggal dalam pembelajaran.

Sesuai dengan Kurikulum 2013, para guru telah menggunakan penilaian formatif yang disebut dengan "penilaian sub-tema dan tema" oleh masing-masing guru.

STUDI INOVASI: PRAKTIK DI DAERAH

Program INOVASI dan TASS telah mendukung Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), yang berada di bawah Badan Penelitian & Pegembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam mengembangkan dan melaksanakan program rintisan dari kedua jenis penilaian tersebut. Pada tahun 2016, bekerja sama dengan Puspendik, Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI, sebelumnya dikenal dengan INAP) untuk siswa kelas 4 SD diselenggarakan di kabupaten-kabupaten di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil dari AKSI untuk kelas 4 ini konsisten dengan hasil-hasil tes internasional seperti PISA, TIMSS dan PIRLS. Di tahun 2019, INOVASI mendukung Puspendik untuk menyusun kerangka kompetensi dan instrumen AKSI untuk kelas 2, 4, 6, 8, dan 10. Ini diharapkan mampu secara signifikan meningkatkan kemampuan sekolah, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat dalam menilai hasil pembelajaran siswa dan menentukan kebutuhan dan trend terkait kinerja sistem penilaian tersebut.

Pada tahun 2017, bekerja sama dengan kabupaten-kabupaten di Nusa Tenggara Barat, INOVASI mengadakan pelatihan bagi guru mengenai penilaian formatif. Upaya tersebut membuahkan hasil di mana guru kelas awal yang sudah dilatih mampu mengidentifikasi kemajuan setiap siswa dalam hal kemampuan membaca melalui penilaian formatif. Mereka dapat mengukur perkembangan siswa dalam hal membaca sub-tugas, seperti mengenali huruf, mengetahui bunyi suara, kosa kata, kelancaran membaca, dan pemahaman membaca. Evaluasi dari program rintisan Guru BAIK menemukan bahwa para guru di sekolah-sekolah pelaksana program menjalankan penilaian formatif dengan mengeksplorasi pemahaman siswa melalui serangkaian pertanyaan. Para guru mitra tersebut cenderung memberikan lebih banyak masukan kepada siswa dibandingkan dengan guru non-mitra. Para guru di kelompok non-mitra tidak melakukan penilaian formatif sesering guru mitra yang terlibat di dalam program rintisan. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa, setelah dilatih, guru mampu melakukan penilaian formatif yang efektif dan menyesuaikan kegiatan belajar mengajar mereka berdasarkan hasil penilaian tersebut[2]. Kegiatan serupa kini sedang dilakukan dengan guru-guru di Sumba dan Kalimantan Utara. Program rintisan yang dilaksanakan oleh INOVASI menemukan bahwa guru mampu menggunakan penilaian kelas sederhana untuk menentukan tingkat kemampuan literasi siswa, dan merancang program pengajaran sesuai dengan berbagai kebutuhan siswa yang kemampuannya beragam.

[1]https://www.mckinsey.com/industries/social-sector/our-insights/how-the-worlds-most-improved-school-systems-keep-getting-better

[2]https://www.inovasi.or.id/en/publication/report-guru-baik-building-teachers-capacity-in-west-nusa-tenggara-indonesia/

Permasalahan utamanya, hingga kini sistem ujian nasional dianggap tidak kredibel, dan karena itu tidak digunakan sebagai sumber informasi bagi pengambilan kebijakan yang dapat meningkatkan hasil pembelajaran di tingkat daerah. Pembaharuan terkini terkait ujian nasional dan pengenalan AKSI dan 'AKSI untuk sekolah'[3], untuk pertama kalinya di Indonesia, mampu memberikan pengukuran hasil pembelajaran siswa yang kredibel. Ini memberikan peluang yang bagus untuk mendukung kebijakan berbasis bukti, bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga di kabupaten yang menyasar peningkatan hasil pembelajaran siswa. AKSI berpotensi memonitor kemajuan siswa selama bersekolah dan memberikan informasi yang kredibel kepada guru, pelaksana pendidikan, dan pembuat kebijakan, misalnya mengenai kemampuan kognitif mana yang kurang berkembang. Karena itu, hal ini dapat menjadi informasi baik untuk perencanaan guru di kelas maupun perkembangan kebijakan di tingkat sekolah, kabupaten, provinsi, dan nasional.

Program rintisan yang dilaksanakan INOVASI di Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur adalah berdasarkan temuan dan penelitian mengenai penilaian yang dilakukan sebelumnya oleh program kemitraan Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP). Temuan awal menunjukkan hasil penilaian seperti EGRA dan AKSI dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada pembuat kebijakan dan pejabat pemerintah daerah akan adanya ketimpangan serius terkait hasil pembelajaran siswa, seperti rendahnya tingkat literasi. Hal ini juga dapat menjadi informasi untuk pengambilan kebijaka, serta perencanaan dan penganggaran kabupaten. Diperlukan lebih banyak upaya untuk menunjukkan bagaimana penilaian ini dapat dimanfaarkan untuk secara efektif menyasar kebutuhan tertentu, seperti kelompok siswa atau sekolah di dalam kabupaten yang prestasinya kurang baik.

Sementara itu, melalui pelaksanaan program rintisan Gema Literasi[4] di Lombok Utara dan Sumbawa Barat, INOVASI juga menemukan bahwa guru kelas awal secara bertahap mampu menilai kemajuan siswa dalam hal kemampuan membaca, dengan menggunakan proses penilaian formatif yang terstruktur.

[3]Sementara AKSI dirancang sebagai asesmen berbasis sampel terhadap hasil pembelajaran di tingkat sistem, seperti TIMSS atau PISA, 'AKSI untuk sekolah' yang baru dirancang agar sekolah dan kabupaten dapat menggunakannya sesuai permintaan, mengunduh instrumennya, melaksanakannya secara independen, dan menggunakan hasilnya sebagai dasar perencanaan dan program di tingkat sekolah. Percontohan 'AKSI untuk sekolah' dilakukan oleh Puspendik untuk kelas 4 dan kelas 8 di paruh kedua 2018.
[4]Laporan akhir Gema Literasi, Maret 2019.
[5]https://www.inovasi.or.id/en/publication/report-guru-baik-building-teachers-capacity-in-west-nusa-tenggara-indonesia/

TANTANGAN UTAMA

Menggunakan hasil penilaian untuk memberikan informasi terhadap kebijakan

Walaupun pemerintah berupaya memastikan agar hasil-hasil ujian nasional menjadi lebih andal, kabupaten dan provinsi tidak terbiasa menggunakan hasil penilaian yang tidak teragregasi dalam pengambilan kebijakan, misalnya mengidentifikasi bidang mana yang membutuhkan sumber daya agar dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Lebih jauh lagi, mereka belum mempunyai kapasitas untuk melakukan ini, termasuk menggunakan bukti hasil pembelajaran sebagai basis untuk menyusun perencanaan dan penganggaran tahunan sekolah. Sebaliknya, ujian kadang-kadang digunakan untuk memberikan peringkat kepada siswa dan juga sekolah. Sekolah swasta terkadang 'terlalu menguji' siswa mereka, mengubah ujian biasa menjadi penilaian dengan harapan tinggi, sehingga mendistorsi kurikulum.

Menghubungkan penilaian dengan kebutuhan dan peningkatan pembelajaran

Seperti terlihat di sekolah-sekolah mitra INOVASI, termasuk pada program rintisan pertamanya yakni Guru BAIK, tidak ada tradisi yang konsisten dalam menggunakan penilaian formatif untuk mendiagnosis kebutuhan belajar individu dan kelompok di jenjang sekolah dasar. Misalnya, mengidentifikasi siswa yang berisiko tertinggal atau membutuhkan dukungan dalam menguasai kemampuan membaca dasar. Selain itu, saat ini tidak ada pengukuran hasil belajar yang andal di kelas awal[5].

Masukan orang tua

Sebagaimana diamati di sekolah-sekolah mitra INOVASI, praktik memberikan laporan hasil pembelajaran siswa kepada orang tua masih tergolong lemah, termasuk dalam memberikan laporan terkait kemajuan anak-anak mereka dalam hal kemampuan literasi dan numerasi dasar di kelas awal. Orang tua menerima rapor resmi yang tidak mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan pembelajaran siswa secara khusus. Hasilnya, secara umum masyarakat kurang memahami kebutuhan untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

PEMERINTAH PUSAT

Rekomendasi dan prioritas kebijakan penguatan penilaian di tingkat pusat meliputi:

1. Meninjau kembali standar nasional tentang proses belajar mengajar untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, terutama terkait penggunaan penilaian yang mampu memberikan informasi tentang proses belajar mengajar.
2. Meninjau kembali standar nasional tentang penilaian pendidikan, terutama bagian tentang penilaian dan pelaporan. Ini dapat diperluas agar mencakup standar kompetensi untuk siswa kelas awal dalam hal literasi dan numerasi dasar, menggunakan standar penilaian EGRA dan AKSI.
3. Buku Pedoman Penilaian untuk Sekolah Dasar (2015) dapat diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, atau pedoman tersebut dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai penilaian hasil belajar oleh pihak sekolah.
4. Meninjau kembali standar nasional tentang penilaian pendidikan, yang menyangkut pelaksanaan ujian sekolah, dan ujian sekolah terstandar nasional di akhir kelas enam. Instrumen AKSI yang baru untuk kelas 2, 4, dan 6 akan bermanfaat untuk: (a) mengevaluasi program sekolah dan trend sistem untuk meningkatkan proses pembelajaran secara terus-menerus; dan (b) memberikan masukan ke sekolah, guru, dan orang tua terkait kinerja individu untuk memastikan anak-anak tidak tertinggal dan mendapatkan dukungan untuk memenuhi harapan di akhir sekolah dasar.

PEMERINTAH DAERAH

Rekomendasi dan prioritas kebijakan penguatan penilaian di tingkat kabupaten/kota meliputi:

1. Mengembangkan kapasitas dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan penilaian (Survei AKSI dan AKSI sekolah) dan menganalisis hasil disagregasi ujian nasional dan AKSI untuk memberikan masukan terhadap kebijakan. Pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan LPTK untuk mengembangkan kapasitas ini dan secara bersama melakukan penilaian dan menganalisis hasilnya untuk tujuan tersebut. Lebih luas lagi, meningkatnya ketersediaan data sebagai alat bantu untuk meningkatkan permintaan dari orang tua dan masyarakat akan pendidikan bermutu kemungkinan besar menjadi kuncinya.
2. Dinas Pendidikan kabupaten/kota dapat memberikan pendanaan untuk kegiatan berbagi praktik-praktik menjanjikan dari sekolah-sekolah yang sukses menerapkan sistem penilaian yang efektif. Mereka dapat berbagi praktik menjanjikan tersebut dengan sekolah lain yang masih menghadapi tantangan, misalnya melalui lokakarya gabungan – terutama dalam hal meninjau, merancang, dan memonitor strategi penilaian di kelas.
3. Memperkuat penggunaan penilaian formatif, sehingga dapat digunakan sebagai sumber dan acuan utama dalam menyusun perencanaan dan penganggaran tahunan, serta untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) bagi para guru.

Risalah Kebijakan ini disusun oleh INOVASI dan Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Data yang disajikan berasal dari hasil Studi Endline INOVASI terkait program rintisan tahap pertama di provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur.